



Identitas Nasional dan Keterlibatan Politik pada Pemilih Pemula Perempuan

Muhammad Zulfa Alfaruqy¹✉

¹Universitas Diponegoro

zulfa.alfaruqy@gmail.com

Abstract

Republik of Indonesia as a democratic country requires the political engagement of all citizens, including young female voters. Political engagement is influenced by psychological, socio-demographic, and macro-context factors. This study aimed to examine the relationship between national identity and political engagement in female novice voters, as well as to examine differences in national identity and political engagement in terms of Pancasila and citizenship course exposure. The population of this study was female students of the Faculty of Psychology, Universitas Diponegoro. Based on the simple random sampling technique, the sample engaged in this study was 260 female students. The measurement uses the National Identity Scale (13 items, $\alpha = 0.852$) and the Political Engagement Scale (11 items, $\alpha = 0.855$). Semi-structured interviews were conducted with three female students to obtain in-depth information about factors influencing political engagement. The results of the study show that there is a significant positive relationship between national identity and political engagement in female novice voters. Statistical analysis showed a correlation coefficient of 0.513 with a significance of 0.000 ($p < 0.05$). National identity makes an effective contribution of 26.3% to political engagement. The results also show that there are differences in national identity and political engagement in terms of Pancasila and citizenship course exposure. Political engagement is self-motivated, family, social media, and courses that examine socio-political issues. The research has implications for the government's urgency in understanding the political behavior of female novice voters so that they have the right strategy to increase their political engagement.

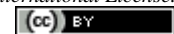
Keywords: college student, national identity, political engagement, novice voters, women

Abstrak

Republik Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi membutuhkan keterlibatan politik dari seluruh warga negara, tidak terkecuali pemilih pemula perempuan. Keterlibatan politik dipengaruhi oleh faktor – faktor psikologis, sosio-demografis, dan konteks makro. Tujuan penelitian ini ialah menguji hubungan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan, serta menguji perbedaan identitas nasional dan keterlibatan politik ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Populasi penelitian ialah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Berdasarkan teknik simple random sampling, maka sampel yang dilibatkan pada penelitian ini berjumlah 260 orang mahasiswi. Pengukuran menggunakan Skala Identitas Nasional (13 aitem, $\alpha = 0,852$) dan Skala Keterlibatan Politik (11 aitem, $\alpha = 0,855$). Wawancara semi terstruktur dilakukan pada tiga orang mahasiswi untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang faktor – faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan. Analisis statistik menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0.513 dengan signifikansi 0.000 ($p < 0.05$). Identitas nasional memberi sumbangan efektif sebesar 26,3 % terhadap keterlibatan politik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada perbedaan identitas nasional dan keterlibatan politik ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan dipengaruhi oleh motivasi diri sendiri, keluarga, media sosial, dan mata kuliah yang mengkaji tentang masalah sosial-politik. Penelitian berimplikasi pada urgensi pemerintah dalam memahami perilaku politik pada pemilih pemula perempuan sehingga memiliki strategi yang tepat guna meningkatkan keterlibatan politiknya.

Kata kunci: mahasiswa, identitas nasional, keterlibatan politik, pemilih pemula, perempuan

Psyche 165 Journal is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Seluruh negara demokrasi membutuhkan keterlibatan politik dari warga negaranya. Secara singkat, keterlibatan politik dapat dimaknai sebagai kesediaan warga negara untuk aktif turut serta dalam mempengaruhi lembaga, proses, dan pengambilan keputusan politik [1]. Keterlibatan politik warga negara mendasari langkah pemerintah, baik pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah, dalam membuat kebijakan publik dan mengatur tatanan sosial yang selaras dengan aspirasi warganya [2]. Salah satu komponen warga negara yang kerap mendapat sorotan kaitannya dengan keterlibatan politik ialah pemilih pemula [3]. Pemilih pemula merupakan warga negara yang dalam kontestasi pemilihan umum baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan politik digambarkan layaknya kurva lengkung, di mana

keterlibatan dari kelompok remaja memiliki kecenderungan lebih rendah daripada kelompok dewasa muda [4]. Keterlibatan pada masa remaja menjadi urgen karena turut menentukan bagaimana keterlibatannya saat masa dewasa [5]. Hal tersebut mendorong dilakukan penelitian mengenai keterlibatan politik remaja sebagai pemilih pemula.

Keterlibatan politik merupakan perilaku individu untuk ikut serta dalam mempengaruhi lembaga politik, proses politik, serta pengambilan keputusan politik [1]. Sebagian ilmuwan membatasi keterlibatan ini hanya pada aktivitas kognitif dan afektif individu saja [6]. Namun sebagian ilmuwan yang lain, menambahkan unsur aktivitas behavioral di samping kognitif dan afektif [4]. Artinya, keterlibatan politik perlu dimanifestasikan individu melalui serangkaian tindakan yang nyata dalam rangka mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik.

Ada enam aspek yang mengkonstruksi keterlibatan politik [4]. Pertama, keterlibatan digital, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan diskusi dan pengungkapan pendapat tentang politik di media sosial. Kedua, keterlibatan komunitas, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan pelibatan diri dalam kegiatan sosial dan penyelesaian masalah di komunitas. Ketiga, keterlibatan kampanye, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan persuasi kepada orang lain untuk menggunakan hak pilih dan memilih kandidat atau partai politik tertentu. Keempat, kontak, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan komunikasi dengan pemerintah dan pengemukakan pendapat di media massa. Kelima, memilih, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum baik level nasional maupun daerah. Keenam, aktivisme, yaitu aktivitas individu yang berkaitan dengan pelibatan diri dalam kegiatan unjuk rasa dan protes tentang pengambilan keputusan politik.

Keterlibatan politik perlu dipupuk sejak dini, minimal pada masa remaja [7]. Remaja merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, yang berlangsung antara 10 hingga 22 tahun [8]. Pada masa remaja, pencarian dan pembentukan identitas menjadi isu yang paling sentral. Individu diharapkan mampu berproses untuk membentuk identitas yang positif melalui eksplorasi dan komitmen [9]. Namun sayang, banyak penelitian menemukan fakta bahwa remaja memiliki ketertarikan politik yang rendah lantaran minimnya ekspos pendidikan kewarganegaraan dan padatnya aktivitas organisasi yang berbasis pada minat [10].

Studi terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan terkait tingkat keterlibatan politik berbasis gender; siapa yang lebih unggul antara remaja laki – laki atau perempuan [1]. Bahkan, pada remaja pemilih pemula berstatus mahasiswa tidak ditemukan ada perbedaan tingkat keterlibatan politik ditinjau dari gender [4]. Meskipun demikian, apabila dianalisis lebih detail sejatinya ada perbedaan khas terkait bentuk

keterlibatan politik antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih menonjolkan aksi politik informal dan kegiatan individual, sementara laki-laki cenderung terlibat dalam kegiatan politik formal dan kegiatan kolektif yang frontal [11]. Hal ini tidak lepas dari sosialisasi peran gender.

Sosialisasi merupakan kunci penting dari keterlibatan politik pemilih pemula. Ada lima agen sosialisasi politik yaitu orangtua, teman sebaya, sekolah, komunitas, dan media sosial. Senada dengan perspektif psikologi perkembangan yang menyatakan bahwa keluarga, teman sebaya, organisasi, dan kampus merupakan pihak yang memainkan peran yang penting dalam mendorong keterlibatan politik [7]. Ada tiga faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik menjadi tiga, yaitu faktor psikologis, faktor sosio-demografis, dan faktor konteks makro [1]. Salah satu faktor psikologis ialah identitas.

Identitas nasional dapat dijelaskan dengan menggunakan perspektif teori identitas sosial. Sebagaimana telah diketahui, identitas sosial sebagai pengetahuan individu tentang keanggotaannya dalam kelompok sosial, beserta nilai dan emosi signifikan yang melekat di dalamnya [12]. Berdasarkan perspektif teori identitas sosial tersebut, maka identitas nasional dapat dimaknai sebagai kesadaran kognitif dan keterikatan emosional individu dengan suatu negara [13].

Berakar dari teori identitas sosial, terdapat tiga aspek dalam identitas nasional, yaitu kognitif, emosional, dan evaluatif [14]. Aspek kognitif merujuk pada kategorisasi dan penyesuaian diri individu dengan negara. Aspek emosional merujuk pada komitmen afektif individu dengan negara sebagai *in-group*, termasuk perasaannya terhadap negara lain sebagai *out-group*. Aspek evaluatif merujuk pada penilaian individu secara pribadi maupun kolektif pada kondisi ideal dan faktual negaranya.

Efek identitas nasional bersifat kontekstual [13]. Individu akan merasakan identitas nasional yang lebih kuat dalam konteks interaksi antar bangsa. Identitas akan mengantarkan pada fenomena *in-group favoritism* dan *out-group derogation*. Kehadiran *out-group* potensial dipersepsikan sebagai sebuah ancaman. Individu dengan identitas nasional yang kuat cenderung memiliki kepatuhan dengan norma dan sikap positif sesama warga negara. Ada hubungan positif signifikan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik, termasuk dalam partisipasi elektoral dalam pemilihan umum [1].

Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib perguruan tinggi. Pada struktur kurikulum Merdeka Program Studi S1 Psikologi Universitas Diponegoro, MKPKN dipelajari mahasiswa di semester 1 (satu). Melalui MKPKN, mahasiswa mempelajari Pancasila dan hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan [15].

Pancasila berkedudukan sebagai ideologi, dasar negara, padangan hidup, sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan (*believe in God*), kemanusiaan (*humanity*), nasionalisme (*unity*), demokrasi (*democracy*), dan keadilan sosial (*social justice*). Secara historis, Pancasila dirumuskan oleh Ir. Soekarno pada fase integrasi antara tahun 1934 hingga 1945 [16]. Pada penelitian tentang segmentasi nasionalisme Ir. Soekarno tersebut, dijelaskan bahwa sang *founding father* memandang keniscayaan multi identitas di Indonesia. Konsep multi identitas berkaitan erat dengan persilangan kategori yang memberi peluang akomodasi kepentingan berbagai pihak tanpa menuntut penyeragaman [17].

Kewarganegaraan membahas tentang konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, serta identitas nasional. Mata kuliah kewarganegaraan mampu untuk meningkatkan pengetahuan individu guna memahami institusi formal dan mekanisme dalam berpartisipasi politik. Mata kuliah kewarganegaraan juga memberi kesempatan bagi pendidik dalam membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik secara kritis, serta membuat argumentasi yang masuk akal. Proses pengajaran mata kuliah kewarganegaraan perlu penekanan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara-cara di mana peserta didik benar-benar mempelajari fenomena di masyarakat dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari [18].

Berdasarkan urian di atas, jelas bahwa keterlibatan politik pemilih pemula perempuan dibutuhkan oleh negara yang menganut sistem demokrasi. Pertanyaannya adalah apakah ada hubungan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan? Apakah ada perbedaan identitas nasional dan keterlibatan politik ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan? Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula perempuan? Tujuan penelitian adalah menguji hubungan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan, serta menguji perbedaan tingkat identitas nasional dan keteterlibatan politik ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Di samping itu, penelitian juga ditujukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula perempuan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian didesain dengan menggunakan metode kuantitatif korelasional dan komparatif, serta kualitatif deskriptif. Variabel X pada penelitian ini adalah identitas nasional, sedangkan variabel Y adalah keterlibatan politik. Metode kuantitatif korelasional digunakan untuk menjawab Hipotesis 1. Metode kuantitatif komparatif digunakan untuk menjawab Hipotesis 2 dan Hipotesis 3. Adapun metode kualitatif deskriptif ditujukan guna menjawab pertanyaan

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula perempuan.

Populasi penelitian ini ialah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang berasal dari angkatan 2022 dan angkatan 2020. Justifikasi melibatkan mahasiswi kedua angkatan ini berkaitan status sebagai pemilih pemula serta ekspos Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPKN) pada semester 1 (satu). MKPKN baru saja dieksposkan kepada angkatan 2022. Di sisi lain, MKPKN telah lama dieksposkan kepada angkatan 2020, yaitu berselang empat semester. Total populasi dari kedua angkatan tersebut adalah 592 mahasiswi. Sampel yang dilibatkan minimal 221 orang mahasiswi dengan taraf kesalahan 5%. Berdasarkan teknik *simple random sampling*, maka sampel yang terlibat sebagai subjek penelitian ini berjumlah 260 orang mahasiswi. Dari 260 orang mahasiswi, 122 di antaranya semester 5, dan 138 di antaranya semester 1. Tiga orang terlibat proses wawancara pada penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen pengumpulan data memakai Skala Identitas Nasional dan Skala Keterlibatan Politik. Skala Identitas Nasional dikembangkan dari aspek yang dikemukakan Reis dan Puente-Palacios [14]. Ada tiga aspek dalam identitas nasional, yaitu kognitif, emosional, dan evaluatif. Skala terdiri dari 13 aitem ($\alpha = 0,852$). Setiap aitem memiliki empat opsi pilihan, mulai dari sangat sesuai hingga sangat tidak sesuai. Skala Keterlibatan Politik dikembangkan dari aspek yang dikemukakan oleh Owen dan Soule [4].

Ada enam aspek dalam keterlibatan politik, yaitu keterlibatan digital, keterlibatan komunitas, keterlibatan kampanye, melakukan kontak, memilih, dan aktivisme. Skala terdiri dari 16 aitem ($\alpha = 0,862$). Setiap aitem memiliki empat opsi pilihan, mulai dari sangat sesuai hingga sangat tidak sesuai. Pengumpulan data kualitatif deskriptif menggunakan wawancara. Pertanyaan utama yang diajukan yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik Anda sebagai pemilih pemula?. Proses pengumpulan data dengan menggunakan Skala Identitas Nasional dan Skala Keterlibatan Politik dilakukan pada tanggal 6 – 7 Januari 2023. Sementara pengumpulan data dengan wawancara dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023. Pertimbangan pengumpulan data dilakukan pada waktu tersebut ialah karena mahasiswa semester 1 baru saja menyelesaikan MKPKN, setelah diekspos selama tanggal 22 Agustus 2022 hingga 23 Desember 2022. Di saat yang sama, mahasiswa semester 5 telah berjarak empat semester diekspos MKPKN.

Analisis data kuantitatif menggunakan SPSS versi 20. Analisis data dimulai dari uji normalitas, uji linearitas, hingga uji hipotesis. Hipotesis 1 diuji menggunakan analisis regresi. Hipotesis 2 dan Hipotesis 3 diuji menggunakan independent t test. Analisis data kualitatif meliputi mempersiapkan dan membaca data verbatim, melakukan koding, menemukan dan mendeskripsikan tema-tema, melakukan interpretasi data, serta menyajikan data [19].

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil uji normalitas pada variabel identitas nasional memperlihatkan angka 0.076 ($0.076 > 0.05$). Sedangkan pada variabel keterlibatan politik memperlihatkan angka 0.123 ($0.123 > 0.05$). Artinya, data pada variabel identitas nasional maupun variabel keterlibatan politik terdistribusi normal. Uji Normalitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji Normalitas

Variabel	p-value	Keterangan
Identitas Nasional	0.076	Normal
Keterlibatan Politik	0.123	Normal

Hasil uji linearitas menunjukkan $0.000 < 0.05$. Artinya, ada hubungan yang linear pada identitas nasional dan keterlibatan politik. Uji Linearitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Linearitas

Variabel	p-value	Keterangan
Identitas Nasional	0.000	Linear
Keterlibatan Politik	0.000	Linear

Ada tiga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0.513 dengan signifikansi 0.000 ($p < 0.05$). Artinya, kedua variabel memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Jadi, H_1 diterima. Ada hubungan positif signifikan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan. Semakin tinggi identitas nasional, semakin tinggi keterlibatan politik pemilih pemula perempuan. Demikian pula sebaliknya. Lebih lanjut, R^2 menunjukkan angka 0.263. Artinya, identitas nasional memberi sumbangan efektif sebesar 26,3% pada keterlibatan politik. Uji Hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Hipotesis

		Identitas Nasional	Keterlibatan Politik
Identitas Nasional	Pearson	1	.513
	Correlation		
	Sig (1-tailed)		.000
Keterlibatan Politik	N	260	260
	Pearson	.513	1
	Correlation		
	Sig (1-tailed)	.000	
	N	260	260

Penelitian selanjutnya menguji H_2 dan H_3 . Hasil analisis pada variabel Identitas Nasional dengan *independent t-test* menunjukkan bahwa rata-rata kelompok yang lama tidak tereskpse MKPKN (angkatan 2020) sebesar 41.67, sedangkan rata-rata kelompok yang baru saja tereskpse MKPKN (angkatan 2022) lebih tinggi yaitu 43.23. Pada *Levene Test* terlihat signifikansi $0.153 > 0.05$. Artinya, varian data dua kelompok bersifat homogen. Pada *equal variances assumed*, signifikansi $0.002 < 0$. Artinya, ada perbedaan yang signifikan pada dua varian kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Ada perbedaan identitas nasional ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Uji komparasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Komparasi

		Levene Test		t-test for Equality Sig. (2-tailed)
		F	Sig	
Identitas Nasional	<i>Equal variances assumed</i>	2.059	.153	.002
Keterlibatan Politik	<i>Equal variances not assumed</i>	13.814	.000	.001

Hasil analisis pada variabel Keterlibatan Politik dengan *independent t-test* menunjukkan bahwa rata-rata kelompok yang lama tidak tereskpse MKPKN (angkatan 2020) sebesar 41.56, sedangkan rata-rata kelompok yang baru tereskpse MKPKN (angkatan 2022) lebih tinggi yaitu 44.01. Pada *Levene Test* terlihat signifikansi $0.000 < 0.05$.

Artinya, varian data dua kelompok bersifat heterogen. Pada *equal variances not assumed*, signifikansi $0.001 < 0.05$ (lihat Tabel 2). Artinya, ada perbedaan yang signifikan pada dua varian kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Ada perbedaan keteterlibatan politik ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hasil statistik deskriptif pada variabel identitas nasional menunjukkan bahwa subjek dengan kategori sangat tinggi sebanyak 126 mahasiswi (48,46%), kategori tinggi sebanyak 130 mahasiswi (50,00%), kategori rendah 4 mahasiswi (1,54%), dan tidak ada kategori sangat rendah. Sehingga, disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswi berada pada kategori tinggi dalam identitas nasional. Deskripsi identitas nasional dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Deskripsi Identitas Nasional

Kategori	Jumlah	Presentase
Sangat Tinggi	126	48,46%
Tinggi	130	50,00%
Rendah	4	1,54%
Sangat Rendah	0	0,00%
Total	260	100,00%

Hasil statistik deskriptif pada variabel keterlibatan politik menunjukkan bahwa subjek dengan kategori sangat tinggi sebanyak 16 mahasiswi (6,15%), kategori tinggi sebanyak 176 mahasiswi (67,69%), kategori rendah 68 mahasiswi (26,16%), dan tidak ada kategori sangat rendah. Sehingga, disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswi juga berada pada kategori tinggi dalam keterlibatan politik. Hasil deskripsi keterlibatan politik dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi Keterlibatan Politik

Kategori	Jumlah	Presentase
Sangat Tinggi	16	6,15%
Tinggi	176	67,69%
Rendah	68	26,16%
Sangat Rendah	0	0,00%
Total	260	100,00%

Peneliti melakukan wawancara kepada tiga partisipan, yaitu Partisipan 1 (P1), Partisipan 2 (P2), dan Partisipan 3 (P3). Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula

perempuan. Faktor keterlibatan politik pemilihan pemula perempuan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Faktor Keterlibatan Politik Pemilih Pemula Perempuan

Faktor Keterlibatan Politik
Motivasi diri sendiri
Keluarga
Media sosial
Mata kuliah relevan

Faktor pertama adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Sebagai mahasiswi psikologi, ketiga partisipan terdorong untuk membaca informasi tentang politik nasional di antara belantara informasi di bidang-bidang lainnya. Meskipun demikian, partisipan tidak memungkiri bahwa pengetahuan tentang politik masih terbatas, dan hanya garis besar saja. Hal ini diungkapkan secara jelas oleh P1 dan P2.

“Sebagai mahasiswa psikologi, saya punya keterbatasan pengetahuan tentang politik. Jadi, saya cari informasi lebih dalam mengenai politik” (P1)

“Saat ada isu politik, saya biasanya ingin tahu garis besar topiknya apa.” (P2)

“Saya update isu politik Indonesia, meski sedang sibuk magang” (P3)

Faktor kedua adalah keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan politik adalah keluarga. Keluarga, khususnya orangtua, yang memberi ruang diskusi politik dengan anak dapat menjadi kesempatan yang baik guna pembiasaan atau kondisioning dalam keterlibatan politik. Sebagaimana diungkap oleh P2 dan P3 yang berdiskusi dengan orangtua tentang isu politik di rumah masing-masing.

“Kedua orang tua saya sering kali bicara hal berbau politik ketika ada saya.” (P2)

“Orangtua saya berlangganan koran sehingga saya memiliki sumber kredibel untuk diskusi dengan orangtua” (P3)

Faktor ketiga ialah media sosial. Media sosial menjadi faktor berikutnya yang turut mempengaruhi partisipan. Misalnya P2 yang mengetahui isu nasional perihal Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari media sosial Twitter. Namun media sosial tentu dipenuhi informasi yang belum tentu benar dan ada tendensi penggiringan opini. Sehingga seperti yang diungkapkan oleh P3, perlu bijaksana dalam memilah dan memilih informasi dari media sosial.

“Twitter. Isu OPM yang di beberapa waktu menarik perhatian saya” (P2)

“Informasi isu politik melalui medsos. Ya, tantangannya simpang siur. Sehingga perlu bijak memilah informasi” (P3).

Keempat ialah mata kuliah yang mengkaji persoalan sosial-politik. Perkuliahan memberi ruang bagi terbukanya wawasan kebangsaan dan politik nasional. Namun, kajian tentang persoalan tersebut minim dilakukan di Program Studi S1 Psikologi. Seperti yang diungkap oleh P1, P2, dan P3, salah satu mata kuliah yang memberi ruang informasi dan diskusi seputar wawasan kebangsaan serta politik nasional adalah

Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurut P2, mata kuliah psikologi sosial juga ada kajian tersebut, meskipun terbatas dan bergantung pada ketertarikan masing-masing pengampu dalam kontekstualisasi materi yang sedang dibahas di kelas.

“Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sih. Di mata kuliah itu saya jadi lebih sadar tentang hak dan kewajiban” (P1)

“Isu kebangsaan, termasuk sosial-politik disinggung di psikologi sosial atau kwn (kewarganegaraan)” (P2)

“Kewarganegaraan di semester lalu” (P3)

Penelitian yang melibatkan mahasiswi sebagai subjek ini memperkuat argumentasi adanya korelasi positif dan signifikan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan. Semakin tinggi identitas nasional, semakin tinggi pula keterlibatan politik pemilih pemula perempuan. Temuan selaras dengan hasil penelitian lain yang menguji hubungan kedua variabel meskipun tidak secara spesifik pada populasi pemilih pemula perempuan. Misal, penelitian di Amerika Serikat yang menemukan ada hubungan positif signifikan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemuda [13].

Penelitian juga menemukan ada korelasi positif signifikan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pemuda di Polandia. Patriotisme konstruktif, sebagai bagian dari identifikasi identitas nasional, secara konsisten mampu untuk memprediksi keterlibatan politik. Pada kehidupan sehari-hari, patriotisme konstruktif dimanifestasikan individu dalam bentuk mengamati, menyadari, dan memberi reaksi terhadap masalah yang dihadapi bangsanya [20].

Penelitian mengkonfirmasi ada perbedaan identitas nasional ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPKN). Kelompok pemilih pemula perempuan yang menerima ekspos MKPKN pada semester sebelumnya memiliki skor yang lebih tinggi pada identitas nasional. Intensitas ekspos pada sesuatu hal berpotensi menimbulkan efek ketertarikan [21]. Dalam konteks penelitian ini, paparan yang dimaksud ialah ekspos MKPKN yang mengkaji tentang keragaman bangsa sebagai identitas nasional, wawasan nusantara, dan bela negara. Kemudian senada dengan *decay theory*, ingatan individu akan tertimbun informasi yang lebih baru [22]. Sehingga tidak mengherankan jika skor pada kelompok pemilih pemula perempuan yang telah lama tidak terespose MKPKN lebih rendah.

Penelitian juga mengkonfirmasi ada perbedaan keterlibatan politik ditinjau dari ekspos MKPKN. Kelompok pemilih pemula yang menerima ekspos MKPKN pada semester sebelumnya memiliki skor yang lebih tinggi pada keterlibatan politik. MKPKN diketahui menyajikan konten tentang hak dan kewajiban warga negara, konstitusi, serta sistem demokrasi. Konten tentang kewarganegaraan membuat seseorang paham institusi formal di sebuah negara serta bagaimana mekanisme dalam partisipasi politik,

termasuk melalui pemilihan umum. Penelitian ini memperkuat penelitian di negara demokrasi belahan utara yang menemukan bahwa kuliah kewarganegaraan mampu memprediksi keterlibatan politik pada mahasiswa [18]. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang politik, maka semakin tinggi tingkat keterlibatan politiknya [23].

Mayoritas pemilih pemula perempuan yang berstatus sebagai mahasiswa berada pada kategori tinggi untuk variabel identitas nasional. Individu dengan identitas nasional yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan terhadap norma kehidupan berbangsa serta sikap positif terhadap sesama warga negara [13]. Individu dengan identitas nasional tinggi cenderung mengalami *in-group favoritism* dan *out-group derogation*. Urgensi identitas nasional semakin dibutuhkan oleh setiap negara dalam menyikapi globalisasi, di mana batas antar negara begitu semu lantaran perkembangan internet dan teknologi informasi [21].

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa mayoritas pemilih pemula perempuan berstatus sebagai mahasiswa berada pada kategori tinggi untuk variabel keterlibatan politik. Tingginya keterlibatan perempuan pada penelitian ini dapat dijelaskan karena ada kesetaraan akses pendidikan pada perempuan berstatus mahasiswa. Pada mahasiswa keterlibatan tergolong tinggi dan tidak ditemukan perbedaan tingkat keterlibatan politik ditinjau dari gender laki-laki dan perempuan [4].

Sebagai catatan, perempuan lebih menonjolkan aksi politik informal dan kegiatan individual. Partisipasi perempuan lazimnya lebih didominasi partisipasi non konvensional yang bersifat individual, tidak dilakukan di depan orang banyak, dan tidak berorientasi pada konflik. Sehingga, ada kecenderungan perempuan muda lebih menyukai keterlibatan sipil daripada politik [11]. Perlu studi lebih lanjut pada pemilih pemula perempuan pada populasi yang lebih umum untuk menjawab kesenjangan gender kaitannya dengan keterlibatan politik.

Temuan yang lain ialah adanya empat faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula perempuan. Pertama, faktor motivasi diri sendiri. Motivasi intrinsik merupakan modal berharga dalam setiap aktivitas individu [24]. Individu yang memiliki ketertarikan terhadap politik cenderung untuk terlibat dan aktif dalam aktivitas politik [25]. Partisipasi individu dalam ranah politik dipengaruhi predisposisi psikologis seperti kepentingan dan efikasi politik [23], serta pengetahuan, atensi, nilai, emosi, dan kepercayaan pada politik [1].

Kedua, faktor keluarga. Hal tersebut mempertegas bahwa keluarga merupakan salah satu pihak yang memainkan peran yang penting dalam mendorong keterlibatan politik [26]. Ketertarikan dan keterlibatan pada orang tua pada politik mempengaruhi keterlibatan politik anak, khususnya ketika anak menginjak usia remaja menengah sampai remaja akhir [27]. Selain variabel keterlibatan politik orangtua, variabel lain

seperti tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan juga mempengaruhi dengan keterlibatan pada anak [28]. Orangtua dapat mempengaruhi keterlibatan politik pada anak, bahkan dalam kondisi tertentu anak juga dapat mempengaruhi keterlibatan politik orangtua [26].

Ketiga, mata kuliah relevan yang mengkaji persoalan sosial-politik. Konten edukasi di lembaga pendidikan berperan penting dalam membentuk sikap dan keinginan berpartisipasi individu dalam politik [23]. Hal tersebut tentu menggarisbawahi pentingnya peran sekolah atau kampus sebagai agen dalam sosialisasi politik [7]. Salah satunya tentu MKPKN yang menyajikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara, konstitusi, serta sistem demokrasi.

Keempat, faktor media sosial. Perlu disadari bersama keterlibatan politik generasi muda, mulai dari generasi milenial atau Y hingga generasi Z, telah mengalami perubahan bentuk [6]. Keterlibatan politik semakin bervariasi dari luring saja, menjadi daring dan luring [29]. Penelitian meta analisis terdahulu menemukan bahwa *political engagement* yang difasilitasi media sosial memiliki hubungan yang kuat dengan aktivitas-aktivitas politik secara luring [30]. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif pada aktivitas politik secara daring, misalnya membaca berita dan diskusi tentang politik. Melalui media sosial seorang pemilih pemula akan mengenal kandidat secara personal maupun program kerja [31].

Aktivitas politik secara daring pada gilirannya akan berdampak positif pula pada aktivitas politik secara luring. Misalnya menghubungi pejabat, diskusi politik, dan unjuk rasa. Meskipun demikian, penggunaan media sosial tidak selalu dapat meningkatkan *political engagement* pada individu. Penelitian yang dilakukan di Jerman, Swiss, dan Jepang menemukan bahwa media sosial merupakan sebuah platform yang berbasis hiburan atau *entertainment*, sehingga konten yang bersifat hiburan tersebut membuat informasi yang berkaitan dengan politik tertutup atau tidak muncul ke permukaan [32]. Penelitian yang dilakukan di Singapore menemukan bahwa media menimbulkan ketakutan terhadap pemerintah maupun sesama netizen dan kebingungan informasi [33]. Akhirnya melalui penelitian ini, dapat dilihat bahwa konseptualisasi dan pola-pola keterlibatan politik di masa sekarang menjadi relevan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya di Indonesia.

4. Kesimpulan

Keterlibatan politik merupakan hal yang esensial bagi negara demokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara identitas nasional dengan keterlibatan politik pada pemilih pemula perempuan. Penelitian menunjukkan ada perbedaan tingkat identitas nasional ditinjau dari ekspos Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan (MKPKN). Pemilih pemula perempuan yang menerima ekspos MKPKN tepat pada semester sebelumnya memiliki skor yang lebih tinggi pada

identitas nasional. Penelitian juga menemukan ada perbedaan tingkat keterlibatan politik ditinjau dari ekspos MKPKN. Pemilih pemula yang menerima MKPKN pada semester sebelumnya memiliki skor yang lebih tinggi pada keterlibatan politik. Teridentifikasi empat faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik pemilih pemula perempuan yaitu motivasi intrinsik diri sendiri, keluarga, media sosial, dan kampus dengan mata kuliah - mata kuliah yang relevan, termasuk MKPKN. Penelitian berimplikasi pada urgensi pemerintah dalam menganalisis perilaku politik pemilih pemula perempuan sehingga memiliki strategi yang tepat guna meningkatkan keterlibatan politiknya. Pemerintah dapat melibatkan peran serta keluarga, institusi pendidikan, atau media. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis konsep dan pola keterlibatan maupun ketidakterlibatan generasi muda dengan metode penelitian yang lebih komprehensif.

Daftar Rujukan

- [1] Barrett, M. & Pachi, D. (2019). *Youth civic and political engagement*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429025570>.
- [2] Walther, A., Lüküslü, D. G., Loncle, P., & Pais, A. (2021). Regimes of youth participation? comparative analysis of youth policies and participation across European cities. *Young*, 29(2), 191–209. <https://doi.org/10.1177/1103308820937550>.
- [3] Alwie, A.F., Jushermi, Pratiwi, D., Anggraini, N., Harianja, M.A.B., & Hidayat, D. (2022). Voting decision of generation Z as novice voter in the 2019 presidential election in Pekanbaru City. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 141-159. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i3.3552>.
- [4] Alfaruqy, M. Z., Padmonurcahyo, A., & Salsabila, A. Z. (2022). Explaining the forms of generation Z's political engagement: A study on generation Z in Semarang, Indonesia. *Simulacra*, 5(2), 99 – 112. <https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.17047>.
- [5] Weiss, J. (2020). What is youth political participation? Literature review on youth political participation and political attitudes. *Frontier in Political Science*, 2, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpos.2020.00001>.
- [6] Pontes, A., Henn, M. & Griffiths, M.D. (2018). Towards a conceptualization of young people's political engagement: A qualitative focus group study. *Societies*, 8(17), 1-17. <https://doi.org/10.3390/soc8010017>.
- [7] Jakubowski, J. (2021). Political socialization in meme times: Adolescents and the sources of knowledge concerning politics. *Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies*, 43(3), 254–274. <https://doi.org/10.1080/10714413.2021.1872315>.
- [8] Kwon, M., Park, E., & Dickerson, S. S. (2019). Adolescent substance use and its association to sleep disturbances: A systematic review. *Sleep Health*, 5(4), 382-394. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2019.06.001>.
- [9] Branje S., de Moor, E.L., Spitzer, J., & Becht, A.I. (2021). Dynamics of identity development in adolescence: a decade in review. *Journal of Research on Adolescence*, 3(4), 908-927. <https://doi.org/10.1111/jora.12678>.
- [10] Pontes, A. I., Henn, M. & Griffiths, M. D. (2019). Youth political (dis)engagement and the need for citizenship education: Encouraging young people's civic and political participation through the curriculum. *Education, Citizenship, and Social Justice*, 14(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/174619791773454>.
- [11] Stefani, S. Prati, G., Tzankova, I., Ricci, E., Albenesi, C. & Cicognani, E. (2021). Gender differences in civic and political engagement and participation among Italian young people. *Social Psychological Bulletin*, 16(1), 1-25. <https://doi.org/10.32872/spb.3887>.
- [12] Kalin, M. & Sambanis, N. (2018). How to think about social identity. *Annual Reviews of Political Science*, 21, 239–257. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042016-024408>.
- [13] Huddy, L., & Ponte, A.D. (2019). National identity, pride, and chauvinism: Their origins and consequences for globalization attitudes. In G. Gustavsson & D. Miller (eds), *Liberal Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions* (pp. 1 – 35). <https://doi.org/10.1093/oso/9780198842545.003.0003>.
- [14] Reis, D. P. D., & Puente-Palacios, K. (2018). Team effectiveness: The predictive role of team identity. *RAUSP Management Journal*, 54(2), 141-153. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-07-2018-0046>.
- [15] Hidayah, Y., Ulfah, N., & Suyitno. (2019). Analisis pendekatan pembelajaran mata kuliah wajib umum pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 22-33. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n1.2019>.
- [16] Alfaruqy, M. Z. (2022). Nasionalisme dari perspektif founding father (Sebuah analisis psiko-hermeneutis). *Jurnal Penelitian Humaniora*, 23(1), 1-11. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v23i1.19163>.
- [17] Bernstein, R.S., Bulger, M., Salipante, P. & Weisinger, J. Y. (2020). From diversity to inclusion to equity: A theory of generative interactions. *Journal of Business Ethics*, 167, 395–410. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04180-1>.
- [18] Heggart, K., Arvanitakis, J., & Matthews, I. (2019). Civics and citizenship education: What have we learned and what does it mean for the future of Australian democracy? *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(2), 101–117. <https://doi.org/10.1177/1746197918763459>.
- [19] Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C. (2018). Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report. *American Psychologist*, 73(1), 26–46. <https://doi.org/10.1037/amp0000151>.
- [20] Rupar, M., Sekerdej, M., & Jamróz-Dolińska, K. (2020). The role of national identification in explaining political and social civic engagement. *Group Processes & Intergroup Relations*, 24(8), 1515-1537. <https://doi.org/10.1177/1368430220967975>.
- [21] Kim, H. (2021). The mere exposure effect of tweets on vote choice. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 455-465. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900979>.
- [22] Ellwart, T. & Kluge, A. (2019). Psychological perspectives on intentional forgetting: An overview of concepts and literature. *Kunstliche Intelligenz*, 33(1), 79–84. <https://doi.org/10.1007/s13218-018-00571-0>.
- [23] Levy, B. L. M., & Akiva, T. (2019). Motivating political participation among youth: An analysis of factors related to adolescents' political engagement. *Political Psychology*, 40(5), 1039-1055. <https://doi.org/10.1111/pops.12578>.
- [24] Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>.
- [25] Zúñiga, H. G.D., & Diehl, T. (2019). News finds me perception and democracy: Effects on political knowledge, political interest, and voting. *New Media & Society*, 21(6), 1253–1271. <https://doi.org/10.1177/1461444818817548>.
- [26] Alfaruqy, M. Z., Emeraldal, T. V. & Dewi, A. C. (2022). Keluarga sebagai mikrosistem sosialisasi politik: Survei

- psikologi politik. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi)*, 13(1), 73–87, <https://doi.org/10.24036/rapun.v13i1.114885>.
- [27] Janmaat, J. G., & Hoskins, B. (2022). The changing impact of family background on political engagement during adolescence and early adulthood. *Social Forces*, 101(1), 227–251, <https://doi.org/10.1093/sf/soab112>.
- [28] Ballard, P. J., Ni, X., & Brocato, N. (2020). Political engagement and wellbeing among college students. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 71, 101209. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101209>.
- [29] Ahmad, T., Alvi, A., & Ittefaq, M. (2019). The use of social media on political participation among university students: an analysis of survey results from rural pakistan. *SAGE Open*, 9(3), 1-9. <https://doi.org/10.1177/21582440198644>.
- [30] Boulianne, S. & Theocharis, Y. (2020). Young people, digital media, and engagement: A meta-analysis of research. *Social Science Computer Review*, 38(2), 111–127, <https://doi.org/10.1177/0894439318814190>.
- [31] Alfaruqy M. Z. (2019). Perilaku politik generasi milenial : Sebuah studi perilaku memilih (voting behavior). *Jurnal Psikologi Jambi*, 4(1), 10–15, <https://doi.org/10.22437/jpj.v4i1.8780>.
- [32] Matthes, J. (2022). Social media and the political engagement of young adults: Between mobilization and distraction. *Online Media Global Community*, 1(1), 6-22. <https://doi.org/10.1515/omgc-2022-0006>.
- [33] Zhang, W. (2022). Political disengagement among youth: A comparison between 2011 and 2020. *Frontiers in Psychology*, 13(809432), 1-10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.809432>.